

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

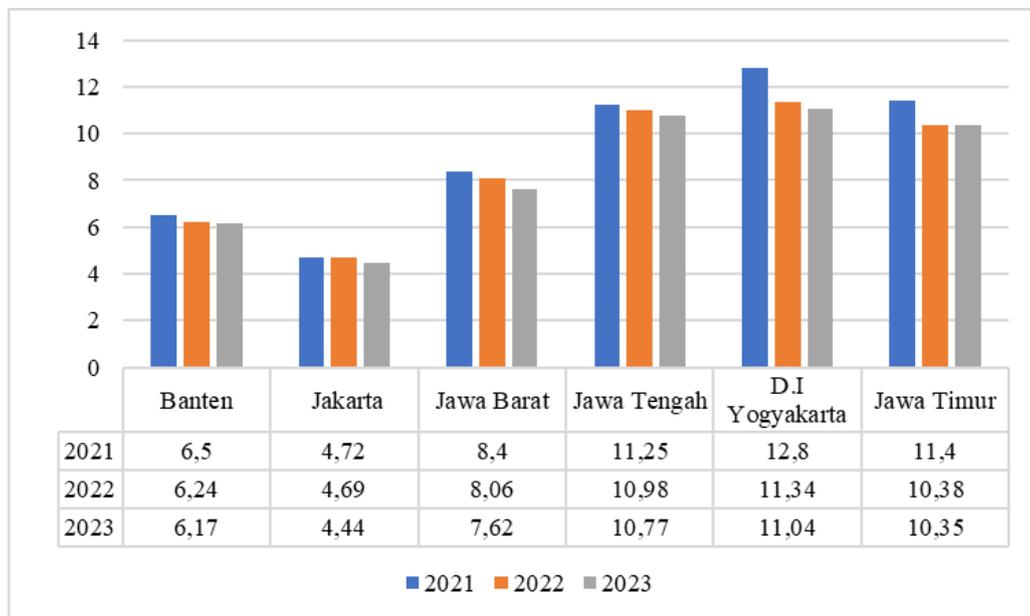
Ketidakstabilan ekonomi menjadi isu strategis dalam pelaksanaan suatu negara karena terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mempunyai implikasi penting terkait persoalan kemiskinan. Kemiskinan yang pasti dihadapi oleh setiap negara, terutama negara berkembang merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang dinilai kompleks dan perlu diperhatikan agar terselesaikan dengan baik. Negara berkembang seperti Indonesia juga memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Kompleksnya menurut (Sembiring et al., 2020) kemiskinan merupakan masalah universal, persoalan kemiskinan ini dalam usahanya sulit dipecahkan karena berkaitan dengan banyak kehidupan.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan saling berkaitan, seperti faktor pengangguran, kesehatan, pendidikan, pendapatan tidak merata, akses terhadap barang dan jasa, gender, geografis, dan lokasi lingkungan (Saraswati, 2020). Dalam menurunkan angka penduduk miskin, pemerintah sudah berjuang dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun melibatkan masyarakat miskin itu sendiri (Putri Anita Rahman, Firman, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengumumkan penurunan tingkat kemiskinan Indonesia menuju level pra pandemi dan tren surplus neraca perdagangan yang masih berlanjut. Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan sebesar

9,36% persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali di Indonesia.

Akan tetapi sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik ekonomi wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja, mengelola ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan daerahnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut berikut grafik perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.

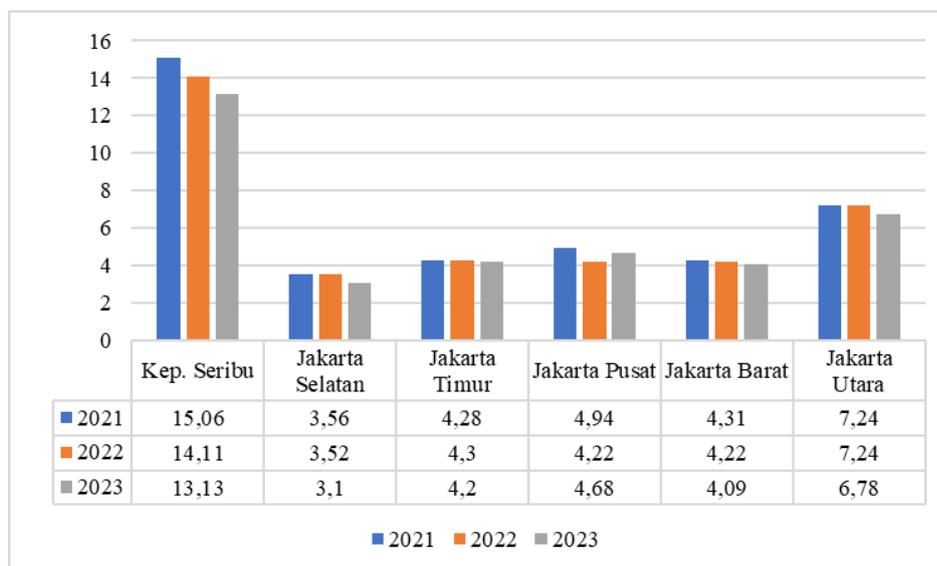


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta memang terendah dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya, namun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tetap mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penduduk DKI Jakarta sendiri berjumlah 11,35 juta jiwa dengan luas wilayah 661,5 serta terus meningkatnya angka urbanisasi, maka semakin banyak penduduk yang tinggal di Jakarta, kebutuhan akan tempat tinggal, pekerjaan yang layak serta fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan meningkat sehingga tingkat kemiskinan juga dapat meningkat.

Dari tingkat kemiskinan DKI Jakarta, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan sebesar 4,72 persen, lalu menurun pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebesar 4,44 persen. Angka kemiskinan pada tahun 2021 terjadi karena tingginya tingkat pengangguran pada saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan para pekerja menurun bahkan kehilangan pekerjaan sehingga membuat kemiskinan meningkat. Akan tetapi, penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 4,44% menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya terjadi dalam periode yang pendek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta masih berpotensi kembali mengalami kenaikan. Berikut merupakan grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta selama tahun 2021-2023 dapat terlihat di gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2024 (diolah)

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2021-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2, tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta memang mengalami naik turun. Tingkat kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun dialami oleh Kabupaten Kepulauan Seribu, wilayah Kepulauan Seribu sendiri terpisah oleh lautan yang menyebabkan struktur ekonomi di Kepulauan Seribu cenderung lebih sederhana dan bergantung pada sektor informal seperti nelayan dan pedagang kecil saja. Ketimpangan pembangunan juga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Kepulauan Seribu menyebabkan minimnya investasi dan program pemulihan ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19. Hal ini berkontribusi pada tingginya pengangguran dan ketidakmampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka menurut (Badan Riset Nasional dan Informasi, 2023), sehingga pendapatan masyarakat di Kepulauan Seribu terlihat lebih rendah dan lebih tidak stabil dibandingkan dengan kota-kota lain di Jakarta. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan lebih tinggi di Kabupaten tersebut. Kota Jakarta Selatan menduduki tingkat

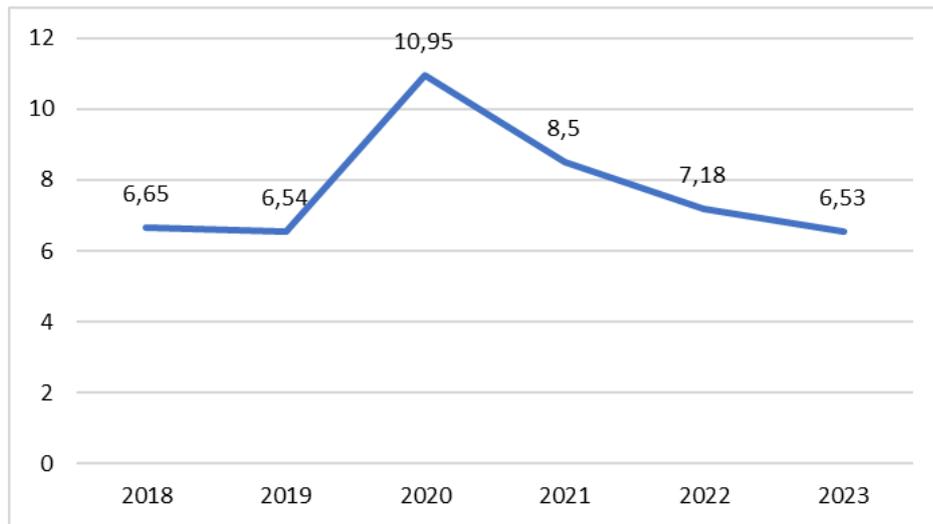
kemiskinan paling rendah dari tahun ke tahun, Jakarta Selatan memiliki kondisi fisik yang spesifik, seperti terletak di pusat kota yang padat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena banyaknya sektor pekerjaan.

Meski dibandingkan Provinsi di Pulau Jawa merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bisa hidup layak di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain (Praja et al., 2023). Daerah perkotaan tidak luput dari adanya kemiskinan, seperti terjadi di DKI Jakarta yang merupakan pusat kegiatan perekonomian nasional. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan merupakan pengangguran. Pengangguran tinggi merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang masih melanda Provinsi Jakarta hingga saat ini. Pengangguran menurut (Amsah Hendri Doni et al., 2023) merupakan salah satu masalah utama jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara, perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran yaitu pengangguran alamiah (*nature of unemployment*).

Menurut (Sukirno, 2016) pendapatan dapat mempengaruhi pengangguran karena salah satu faktor yang mempengaruhi kemakmuran suatu masyarakat. Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan jika pendapatan masyarakat mencapai maksimum. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT)

karena tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Berikut merupakan grafik tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2023 dapat terlihat di gambar 1.3.



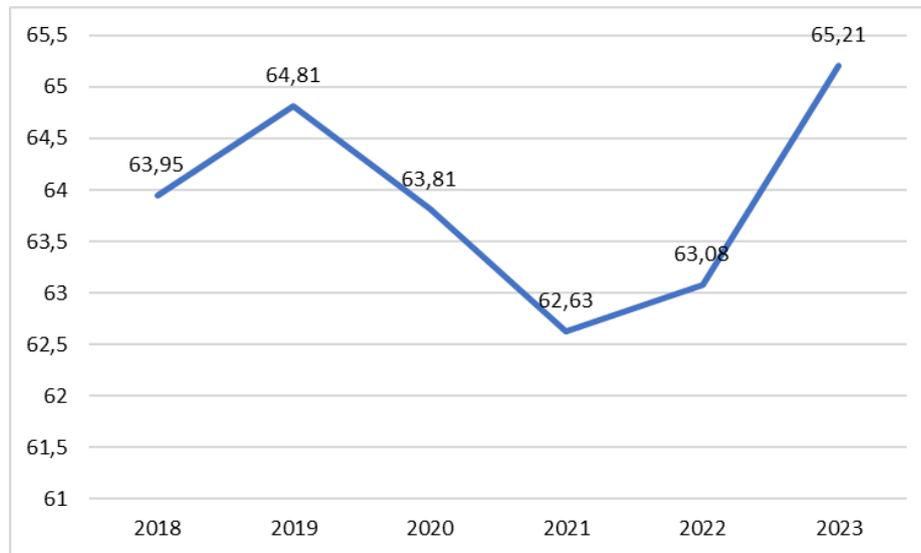
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024 (diolah)

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 tingkat pengangguran di DKI Jakarta yang awalnya berada disekitar angka 6 persen, karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia serta melumpuhkan beberapa sektor termasuk ekonomi hingga banyak sekali angkatan kerja yang tidak terserap maka tingkat pengangguran naik bahkan mencapai 10 persen, namun sampai tahun 2023 tingkat pengangguran terus menurun yang menunjukkan lapangan kerja di Jakarta membaik. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan dan upaya pemerintah di DKI Jakarta dalam menangani masalah pengangguran selama periode tersebut. Dengan menurunnya angka pengangguran, badai pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tetap tidak terhindarkan. Pada tahun 2023, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di

Jakarta tercatat sebanyak 8.202 karyawan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Kejadian ini menunjukkan bahwa Jakarta mengalami dampak signifikan dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Efek buruk dari pengangguran sendiri dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang (Aini & Islamy, 2021).

Timbulnya kemiskinan menurut (Sofia Janahtul Isnaini, 2020) juga dikarenakan faktor rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja serta minimnya peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja. Pada dasarnya tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Sagir (1994) dalam (Ahmaddizon, 2020) kesempatan kerja yang merupakan lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dari kesempatan kerja dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berikut merupakan grafik tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2023 dapat terlihat di gambar 1.4.

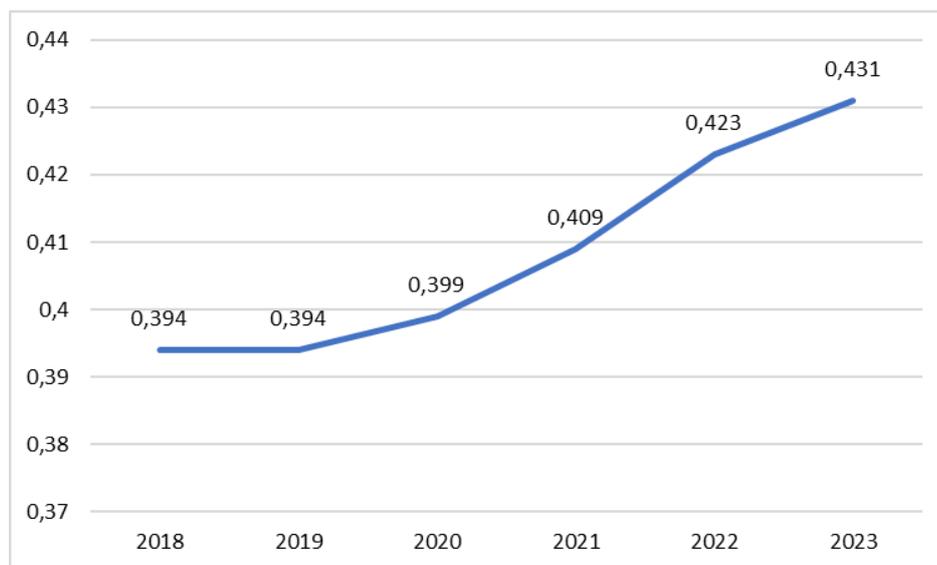


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024 (diolah)

Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DKI Jakarta Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4, Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2021, namun setelahnya meningkat drastis hingga mencapai 65,21 persen pada tahun 2023. Besarnya angka TPAK ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat serta tingginya arus urbanisasi di Jakarta. Dengan siklus peningkatan angka urbanisasi dari tahun ke tahun, pada 2023 jika di total keseluruhan pendatang dari luar Jakarta hampir menyentuh angka 200.000 (Soleman, 2024). Jika angka produktif masyarakat semakin banyak, maka output yang dihasilkan akan tinggi pula dan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang semakin menurun (Alfionika, 2021). Meskipun angka partisipasi angkatan kerja meningkat, tantangan dalam mencari pekerjaan masih banyak, misalnya pekerja sulit mendapat pekerjaan dan sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi di sebuah wilayah dengan tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Alat ukur dalam ketimpangan distribusi pendapatan adalah rasio gini. Semakin rendah nilai koefisien Gini menurut (Nur Aini & Nugroho, 2023) menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan, sedangkan semakin tinggi nilai koefisien Gini menunjukkan semakin tidak meratanya distribusi antar kelompok penerima pendapatan. Berikut merupakan grafik ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2023 dapat terlihat di gambar 1.5.



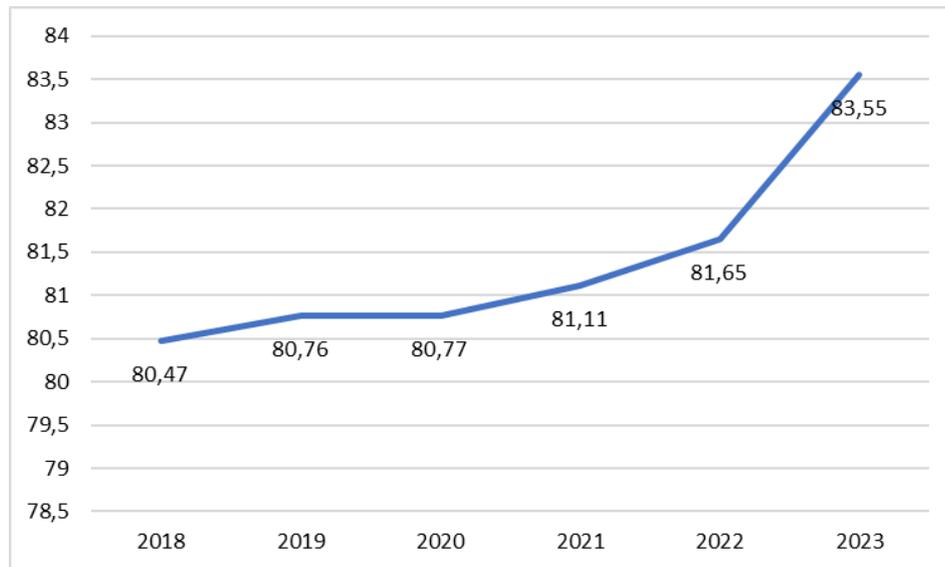
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024 (diolah)

Gambar 1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan DKI Jakarta Tahun 2018-2023 (Persen)

Terlihat pada gambar 1.5 bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta semakin naik setiap tahunnya. Ketimpangan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0,394 persen dan tertinggi mencapai 0,431 persen pada tahun 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru

Budi Hartono menyatakan bahwa banyak pendatang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, namun tidak semua berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut (Nisa et al., 2020) hal ini menandakan bahwa jurang kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya semakin melebar dan menunjukkan bahwa tingkat pemerataan ekonomi memang belum cukup baik di DKI Jakarta. Sehingga ketimpangan dalam distribusi pendapatan semakin mencolok. Banyak individu terjebak dalam pekerjaan informal dengan gaji rendah maka menyebabkan mereka tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka dan semakin jauh dari garis kemiskinan, sementara kelompok berpendapatan tinggi terus mengakumulasi kekayaan.

Faktor selanjutnya yang memiliki kaitan dengan kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu penentu tingkat pengangguran terbuka karena manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subjek. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara makro dan menjadikan sebagai majunya suatu negara. Terdapat tiga hal yang menjadi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan kehidupan yang layak. Ketika indeks pembangunan manusia rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja penduduk, maka akan menyebabkan kurangnya daya beli sehingga akan masuk kedalam lingkaran kemiskinan (Panjaitan, 2020). Berikut merupakan grafik indeks pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2023 dapat terlihat di gambar 1.6.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024 (diolah)

Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan pada gambar 1.6 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2018-2023. Indeks pembangunan manusia tertinggi tentunya berada pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,55 persen. Angka IPM terus meningkat setiap tahunnya karena pemerintah di Jakarta banyak membantu masyarakat dengan memberikan beberapa jenis bantuan langsung tunai mulai dari penduduk usia muda hingga lansia. (Agustin & Sumarsono, 2022) dengan memberikan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan pada masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kenaikan tingkat pendapatan. dan kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta. Ketika ketiga komponen IPM terutama pendidikan menurut (Hasibuan, 2023) jika meningkat maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga tercipta tenaga kerja yang terampil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin meneliti lebih lanjut penelitian dengan judul **Faktor Penentu Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan

manusia secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dan memberi kajian yang lebih baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DKI Jakarta. Hal yang belum banyak diteliti adalah variabel ketimpangan distribusi pendapatan terkait pengaruhnya terhadap kemiskinan khususnya di kota besar seperti DKI Jakarta selama tahun 2018 sampai 2023 dengan harapan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun empiris bagi penulis. Tidak hanya itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi
- b. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya pada lingkungan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi.

- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Jakarta peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS pusat dan BPS Provinsi DKI Jakarta.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang disusun untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Jadwal penelitian ini dibuat dalam bentuk matriks dan direncanakan mulai Agustus 2024 dan diperkirakan selesai sampai dengan:

